

Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan di Polrestabes Palembang

Tania¹, Fitriasuri²

^{1,2}Universitas Bina Darma

taniaa200624@gmail.com¹, fitriasuri@binadarma.ac.id²

ABSTRACT

The implementation of the concept of Good Governance and a systematic internal control framework is expected to improve the performance of financial management in the Palembang Police environment. Although various provisions and guidelines on Good Governance and SPIP have been available, findings in the field still found various obstacles related to consistency of implementation, transparency of information, accountability, synergy between units, and optimal use of information technology. "These obstacles can reduce the effectiveness of management and increase the possibility of deviations. This study uses a survey methodology with 54 respondents, with data collection through questionnaires and evaluation using multiple linear regression to assess the impact of each variable. The results of this study aim to refine the theoretical framework and practical applications, so that they can enrich academic literature and provide policy suggestions in order to improve financial governance in the Palembang Police environment. Improving human resource competence, internalizing the ideals of integrity, and establishing a consistent supervisory framework are essential to realizing a professional, transparent, and responsible police institution in the future.

Keywords: *Governance of public institutions, Effectiveness of internal supervision, Consistency of regulatory implementation, Accountability in state finances.*

ABSTRAK

Penerapan konsep *Good Governance* dan kerangka pengendalian internal yang sistematis diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Palembang. Meskipun telah tersedia berbagai ketentuan dan pedoman tentang *Good Governance* dan SPIP, namun hasil temuan di lapangan masih ditemukan berbagai kendala terkait konsistensi pelaksanaan, transparansi informasi, akuntabilitas, sinergi antar unit, dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. "Kendala tersebut dapat menurunkan efektivitas pengelolaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan. Penelitian ini menggunakan metodologi survei dengan jumlah responden 54 orang, dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan evaluasi menggunakan regresi linier berganda untuk menilai dampak masing-masing variabel. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan kerangka teori dan aplikasi praktis, sehingga dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan saran kebijakan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan di lingkungan Polda Palembang. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, internalisasi cita-cita integritas, dan pembentukan kerangka pengawasan yang konsisten sangat diperlukan untuk mewujudkan institusi kepolisian yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab di masa mendatang.

Kata Kunci: Tata kelola lembaga public, Efektivitas pengawasan internal, Konsistensi pelaksanaan regulasi, Akuntabilitas dalam keuangan negara.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, pemerintahan yang baik merupakan konsep yang bersifat kolektif, yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai good dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih adalah model

pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik apabila produktivitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spriritualitasnya (Nurhidayat, 2023).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Presiden, selaku pemegang otoritas pemerintahan, juga memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan visi dan misi negara. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan, hingga proses pengawasan dan pelaporan (Rahman & Rachman, 2021). Dalam konteks ini, keuangan negara merujuk pada seluruh hak dan kewajiban pemerintah yang bernilai ekonomis, termasuk seluruh aset dan kekayaan negara yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan (Amtiran, 2020). Ini berarti bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pengelolaan aset publik termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara. Hal ini mencakup kewenangan dalam pemungutan pajak, pembayaran utang, pembiayaan layanan publik, hingga pengelolaan kekayaan negara lainnya.

Untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, diperlukan sistem pengendalian yang memadai terhadap seluruh sumber daya fiskal. Pengelolaan keuangan yang terorganisir berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan keberlanjutan kesejahteraan publik. Proses ini melibatkan aspek perencanaan anggaran, pengaturan investasi, pengendalian arus kas, pengawasan pengeluaran, serta kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat (Susetyo et al., 2023). Dengan perencanaan keuangan yang matang, baik individu maupun institusi dapat menghindari tekanan finansial berlebih dan memiliki kendali yang lebih baik terhadap kondisi ekonomi masing-masing.

Dalam konteks kekinian, paradigma administrasi pemerintahan telah bergeser dari sistem birokrasi yang kaku menuju sistem tata kelola yang bersifat kolaboratif. Model ini menekankan pada kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sebagai pilar utama dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas. Beberapa kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, serta peluncuran gerakan reformasi birokrasi sejak 2007, merupakan bukti nyata upaya pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip *Good Governance* (Artameviah, 2022).

Konsep *Good Governance* juga telah banyak didefinisikan oleh institusi internasional, termasuk UNDP, yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bukan hanya sebagai syarat administratif untuk menerima bantuan luar negeri, tetapi sebagai landasan utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, menjamin keadilan, serta kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat (Walangitan, 2020).

Di sisi lain, untuk menunjang peningkatan kinerja birokrasi, diperlukan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, SPIP adalah suatu proses berkelanjutan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur organisasi guna memberikan keyakinan bahwa tujuan lembaga dapat dicapai dengan efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku (Munawaroh, 2022).

Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dan SPIP di lingkungan Polrestabes Palembang belum sepenuhnya optimal. Beberapa permasalahan yang masih ditemui di antaranya adalah rendahnya konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, lemahnya koordinasi lintas unit kerja, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi keuangan. Meskipun kerangka regulasi telah disediakan secara formal, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam aspek perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaporan.

Oleh karena itu, perbaikan kinerja pengelolaan keuangan di Polrestabes Palembang memerlukan strategi konkret yang meliputi penguatan asaa-asas tata Kelola pemerintahan yang baik serta sistem kendali internal yang komprehensif. Upaya tersebut mencakup peningkatan kompetensi aparatur, internalisasi nilai-nilai integritas dalam setiap lini kerja, serta pembangunan sistem pengawasan yang berkelanjutan. Hanya melalui langkah-langkah strategis tersebut, lembaga kepolisian dapat menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara profesional, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul "*Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan di Polrestabes Palembang.*"

TINJAUAN LITERATUR

Good Governance

Menurut Aryani (2021), *Good Governance* dapat dipahami sebagai pendekatan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial oleh negara yang berfokus pada pembangunan masyarakat secara berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, keterbukaan akses informasi publik, supremasi hukum, perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta penerapan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan (Nurhidayat, 2023).

Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah sebuah mekanisme yang melibatkan perencanaan struktural organisasi serta prosedur operasional guna menjaga keamanan aset, menjamin keakuratan data, dan mendukung pencapaian tujuan manajerial secara menyeluruh (Monoppo, 2018). Tujuan utama dari pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi pihak manajemen bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan (Ambarwati & Rahmawati, 2022). Selain itu, Lusiana dan Arfamaini (2022) menguraikan bahwa struktur dari sistem pengendalian internal terdiri atas lima elemen kunci, yaitu: lingkungan

pengendalian, proses evaluasi risiko, langkah-langkah pengendalian, serta sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan secara kontinu.

Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.. 13 Tahun 2006, yang mengatur tata kelola keuangan daerah, kinerja didefinisikan sebagai hasil nyata dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang dapat dievaluasi berdasarkan kuantitas maupun kualitas dalam hubungannya dengan alokasi anggaran. Secara umum, kinerja mencerminkan tingkat pencapaian yang berhasil diraih dari program atau aktivitas yang sudah direncanakan dan dibiayai. Di sisi lain, Munawaroh (2022) menyampaikan bahwa kinerja dalam konteks keuangan menggambarkan efektivitas lembaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan sistem dan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku, baik dari sisi internal organisasi maupun sesuai regulasi yang ditetapkan institusi.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada para pegawai yang bekerja di lingkungan Polrestabes Palembang. Para pegawai ini menjadi sumber utama data primer dalam studi ini, dengan total partisipan sebanyak 50 orang. Lokasi kegiatan penelitian terletak di Jalan Gubernur H. Bastari, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan platform Google Form. Formulir ini langsung diisi oleh personel Polrestabes Palembang yang ditunjuk sebagai responden dalam penelitian.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data penelitian: data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari responden menggunakan kuesioner yang ditujukan untuk menyelidiki perspektif mereka tentang penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, efektivitas pengendalian internal, dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersamaan dengan itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tekstual, termasuk publikasi akademis, berita media massa, dan makalah pendukung lainnya yang diperoleh dari internet. Data ini digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan memfasilitasi proses analisis.”

Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi ini mencakup seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan Polrestabes Palembang. Mengingat jumlah populasi yang tidak terlalu besar, yaitu sebanyak 50 orang, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus atau

total sampling, di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Pradana et al., 2021). Meskipun terdapat perbedaan data dalam laporan sebelumnya yang menyebutkan bahwa jumlah responden sebanyak 100 orang, peneliti menegaskan bahwa jumlah aktual yang digunakan dalam analisis tetap sesuai dengan jumlah populasi yaitu 50 orang.

Teknik Analisis Data

Data kuesioner dianalisis melalui regresi linier berganda. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabel, baik secara bersamaan maupun secara independen (parsial). Sebelum melakukan analisis regresi, statistik deskriptif dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang fitur masing-masing variabel. Serangkaian evaluasi dilakukan terhadap kualitas instrumen penelitian, yang meliputi uji validitas untuk mengetahui keakuratan alat ukur dalam merepresentasikan variabel yang dimaksud, uji reliabilitas untuk mengevaluasi konsistensi hasil pengukuran, dan uji normalitas untuk mengetahui apakah distribusi data mematuhi asumsi normalitas. Seluruh prosedur analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 26.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2018), validitas merujuk pada tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur aspek yang memang hendak diteliti, sesuai dengan karakteristik objek penelitian. Pada studi ini, proses uji validitas dikerjakan dengan bantuan SPSS versi 26.0. berbasis Windows OS. Adapun hasil pengujian terhadap validitas instrumen pada variabel *Good Governance* akan disajikan secara rinci dalam bentuk tabel pada bagian berikutnya.

Tabel 4. 1 Variabel X1 (Good Governance)

| No | Item Pernyataan | Corrected item-total correlation (r-hitung) | r table | Keterangan |
|----|-----------------|---|---------|------------|
| 1 | X1.1 | 0,295 | 0,268 | Valid |
| 2 | X1.2 | 0.459 | 0,268 | Valid |
| 3 | X1.3 | 0,306 | 0,268 | Valid |
| 4 | X1.4 | 0,631 | 0,268 | Valid |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 26, 2025

Merujuk pada Tabel 4.6, diketahui bahwa variabel Pengendalian Internal terdiri dari lima pernyataan, dengan nilai r tabel sebesar 0,268 untuk masing-masing item. Karena seluruh nilai r hitung melebihi angka tersebut, maka seluruh pernyataan pada variabel ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Berikutnya, hasil uji validitas untuk variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2 Pengendalian Internal (X2)

| No | Item Pernyataan | Corrected item-total correlation (r-hitung) | r table | Keterangan |
|----|-----------------|---|---------|------------|
| 1 | X2.1 | 0,430 | 0,268 | Valid |
| 2 | X2.2 | 0,320 | 0,268 | Valid |
| 3 | X2.3 | 0,496 | 0,268 | Valid |
| 4 | X2.4 | 0,295 | 0,268 | Valid |
| 5 | X2.5 | 0,626 | 0,268 | Valid |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan table 4.6, dijelaskan bahwa hasil uji validitas menunjukkan terdapat 5 item pernyataan pada instrumen yang memiliki nilai r table sebesar 0,268. Ini mengindikasikan bahwa r hitung untuk variable Pengendalian Internal lebih besar dari pada r table, yang berarti variable tersebut dapat dinyatakan valid

Berikutnya, hasil uji validitas untuk variable Kinerja Pengelolaan Keuangan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4. 3 Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)

| No | Item Pernyataan | Corrected item-total correlation (r-hitung) | r table | Keterangan |
|----|-----------------|---|---------|------------|
| 1 | Y.1 | 0,324 | 0,268 | Valid |
| 2 | Y.2 | 0,417 | 0,268 | Valid |
| 3 | Y.3 | 0,463 | 0,268 | Valid |
| 4 | Y.4 | 0,353 | 0,268 | Valid |
| 5 | Y.5 | 0,339 | 0,268 | Valid |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2025

Tabel 4.7 menampilkan hasil Uji validitas untuk variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan, yang memiliki sepuluh pernyataan, menunjukkan bahwa semua item memiliki nilai r hitung yang melebihi r tabel. sebesar 0,268. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi kriteria validitas, sehingga bisa dipakai sebagai alat yang sah untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan.

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018), Reliabilitas mengacu pada kemampuan suatu instrumen dalam menghasilkan informasi yang tetap digunakan berulang kali pada objek yang sama. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut memberikan hasil yang stabil dalam kondisi yang sejenis. Adapun temuan uji reliabilitas untuk variabel *Good Governance* disajikan pada Tabel 4.8 berikut.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's alpha | Batas Reabilitas | Keterangan |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| Good Governance | 0,773 | 0,06 | Reliabel |

| | | | |
|------------------------------|-------|------|----------|
| Pengendalian Internal | 0,782 | 0,06 | Reliabel |
| Kinerja Pengelolaan Keuangan | 0,883 | 0,06 | Reliabel |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26,2025

Tabel 4.8 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel tersebut. *Good Governance* mencapai 0,773, yang mengindikasikan bahwa instrumen tersebut memiliki tingkat keandalan yang baik. Variabel Pengendalian Internal memperoleh nilai 0,782, yang juga menunjukkan reliabilitas yang memadai. Sementara itu, variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan mencatat nilai Cronbach's Alpha tertinggi, yaitu 0,883, yang mencerminkan konsistensi internal yang sangat kuat. Oleh karena itu, seluruh instrumen pada ketiga variabel tersebut dinyatakan andal dan bisa dipakai secara layak sebagai instrumen pengukuran dalam studi ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya dalam model regresi mengikuti distribusi normal, sebuah model regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi data yang normal atau penyebaran data yang terletak pada sumbu diagonal grafik distribusi normal (Ghozali, 2019). Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas

| Kolmogorov-Smirnov Test | Sig. (p-value) | Keterangan |
|-------------------------|----------------|------------|
| 0,200 | 0,05 | Normal |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2025

Merujuk pada hasil yang ditampilkan dalam Tabel 4.11, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena angka tersebut melebihi ambang batas signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, ini menunjukkan bahwa distribusi data dalam model regresi memenuhi asumsi normalitas secara statistik. Dengan demikian, data dianggap tersebar pada umumnya dan layak untuk dianalisis lebih lanjut dalam model regresi.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | Tolerance | VIF | Keterangan |
|-----------------------|-----------|-------|-------------------------------------|
| Good Governance | 0,998 | 1.002 | bebas dari gejala multikolinieritas |
| Pengendalian Internal | 0,998 | 1.002 | bebas dari gejala multikolinieritas |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2025

Merujuk pada Tabel 4.12, nilai VIF (Faktor Inflasi Varians) untuk faktor *Good Governance* adalah 1,255, sementara variabel Pengendalian Internal memiliki nilai VIF sebesar 1,002. Kedua nilai tersebut berada jauh di bawah batas toleransi maksimum sebesar 10, yang menandakan tidak adanya gejala multikolinearitas dalam model regresi. Dengan demikian, antarvariabel independen tidak menunjukkan korelasi linear yang tinggi, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan tanpa kekhawatiran terhadap bias yang disebabkan oleh multikolinearitas.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil uji Heteroskedastisitas yang adapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| R Square | χ^2 hitung | C ² tabel | Keterangan |
|----------|-----------------|----------------------|---|
| 0,067 | 36,18 | 70,993 | Tidak terjadi gejala heteroskesdastisitas |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam tabel, diperoleh nilai R Square sebesar 0,067. Nilai Chi-Square hitung tercatat sebesar 36,18, yang berada di bawah nilai Chi-Square tabel yaitu 70,993. Ini berarti model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, distribusi residual bersifat seragam atau homogen, sehingga model dianggap memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Berikut ini disajikan hasil pengujian regresi linear berganda dalam table berikut ini:

Tabel 4. 12 Regresi Linear Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .074 | 2.671 | | 1.151 | .255 |
| | Good Governance | .261 | .063 | .321 | 4.147 | .000 |
| | Pengendalian Internal | .146 | .058 | .257 | 2.512 | .015 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2025

Berdasarkan table diatas, didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3.974 + 0,261 X_1 + 0,146 X_2 + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijadikan sebagai berikut:

1. Konstanta(a=3,974)

Angka 3,974 menunjukkan nilai awal Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) ketika *Good Governance* (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2) sama-sama bernilai nol. Artinya, tanpa

pengaruh kedua variabel independen, skor kinerja keuangan berada di level 3,974. Koefisien regresi variable *Good Governance* sebesar 0,261. Apabila variabel *Good Governance* (X1) mengalami kenaikan 1% oleh karena itu nilai variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) menunjukkan peningkatan.

2. Pengaruh *Good Governance* ($\beta_1 = 0,261$)

Koefisien 0,261 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu poin pada *Good Governance* akan menaikkan skor Kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar 0,261 poin, dengan asumsi faktor lain tetap konstan.

3. Pengaruh Pengendalian Internal ($\beta_2 = 0,146$)

Nilai 0,146 artinya apabila Pengendalian Internal naik satu poin, maka Kinerja Pengelolaan Keuangan akan meningkat sebesar 0,146 poin, dengan variabel lainnya tidak berubah.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4. 13 Koefisien Determinasi (R^2)

| Model | R | R Square | Adjusted Square | R | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-----------------|---|----------------------------|
| 1 | .683 ^a | .467 | .446 | | 1.20718 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2025

Tabel 4.15 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,467 yang menggambarkan sejauh mana model regresi yang terbentuk dari interaksi antara variabel bebas (*Good Governance* dan Pengendalian Internal) dan variabel terikat (Kinerja Pengelolaan Keuangan) dapat menjelaskan variabel terikat, nilai ini mengindikasikan bahwa variabel bebas memberikan kontribusi sebesar 46,7% terhadap variabel terikat.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan F digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan, hasil uji f dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4. 14 Uji F

| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 65.160 | 2 | 32.580 | 22.357 | .000 ^b |
| | Residual | 74.322 | 51 | 1.457 | | |
| | Total | 139.481 | 53 | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26,2025

Mengacu pada Tabel 4.16 dan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan software SPSS versi 26, diperoleh nilai F hitung sebesar 22,357, Nilai F yang dihasilkan jauh lebih besar dari F tabel (2,397). Ditambah lagi, nilai signifikansi yang mencapai 0,000 berada jauh di bawah batas signifikansi yang ditetapkan 0,05. Hasil ini menjadi dasar yang kuat untuk ini berarti hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima,

menyimpulkan adanya dampak simultan yang jelas pada variabel *Good Governance* dan Pengendalian Internal pada Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Polrestabes Palembang.

Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen, yaitu Kinerja Manajemen Keuangan. Jika nilai signifikansi variabel independen melebihi 0,05, variabel tersebut dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi di bawah 0,05, variabel tersebut dianggap memiliki pengaruh substansial terhadap variabel yang diteliti. Temuan uji t secara menyeluruh dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.17.

Tabel 4. 15 Uji T

| Variabel | T | Sig | Keterangan |
|-----------------------|-------|-------|-------------|
| Good Governance | 4,147 | 0,000 | H1 diterima |
| Pengendalian Internal | 2,512 | 0,015 | H2 diterima |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 26, 2024

Tabel 4.17 menampilkan nilai signifikansi untuk setiap variabel independen (*Good Governance* dan Pengendalian Internal) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan sebagai variabel dependen. Hasil uji hipotesis parsial melalui uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel *Good Governance* menunjukkan nilai signifikansi 0,000, yang berada di bawah batas 0,05. Ini menandakan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan di Polrestabes Palembang. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima, hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima.
2. Variabel Pengendalian Internal juga menunjukkan nilai signifikansi 0,015, di bawah ambang batas 0,05. Ini menandakan bahwa Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Jadi, H_0 kembali ditolak dan H_2 diterima.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa dua variabel bebas tersebut, yaitu *Good Governance* (X_1) dan Pengendalian Internal (X_2), berpengaruh besar dalam meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, diketahui bahwa variable penerapan good governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Polrestabes Palembang, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,261 serta hasil analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa semakin kuat good governance yang diterapkan maka semakin baik pula kinerja pengelolaan keuangan yang dihasilkan. (Rahmawati et al., 2024).

Hasil analisis data dalam penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Polrestabes Palembang. Hal ini terlihat dari peningkatan efisiensi dalam

penggunaan anggaran operasional, ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, serta meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan regulasi yang berlaku. Pegawai yang bekerja dalam sistem yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengelola sumber daya keuangan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Temuan ini mencerminkan bahwa tata kelola yang baik bukan hanya memperbaiki proses administratif, tetapi juga mendorong budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab. (Abdul Rauf dan Dwi Andriani, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Governance memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di Polrestabes Palembang. Tata kelola yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi mendorong terciptanya sistem kerja yang efisien, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini mempertegas bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik bukan hanya meningkatkan kinerja administratif, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan implementasi Good Governance perlu terus didorong di setiap lini organisasi, agar pengelolaan keuangan Polrestabes Palembang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. (Rauf dan Andiani, 2023).

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Polrestabes Palembang, penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada Polrestabes Palembang. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisiensi regresi yang cukup tinggi yaitu 0,146 hasil analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa semakin kuat pengendalian internal yang diterapkan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, pengendalian internal merupakan proses yang terintegritas dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan melalui kegiatan yang efisien dan efektif. (Sari Pratama, 2024).

Menurut hasil penelitian, pegawai yang bekerja dalam sistem dengan pengendalian internal yang kuat menunjukkan tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dalam mengikuti prosedur keuangan, lebih akurat dalam pencatatan, serta lebih tertib dalam penyusunan dan pelaporan anggaran. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya kesalahan administrasi, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, serta lebih efektifnya penggunaan anggaran operasional. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, risiko penyelewengan dana dan pemborosan dapat diminimalisir, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. (Putra dan Wulandari, 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di Polresta Palembang. Pengendalian internal yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang tertib, transparan, dan akuntabel, sehingga seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, hingga pelaporan, dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal perlu terus dilakukan, baik melalui peningkatan kompetensi personel, pembaruan prosedur, maupun pemanfaatan teknologi informasi, agar kinerja keuangan institusi semakin profesional dan terpercaya di mata publik. (Putra & Wulandari, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* dan sistem pengendalian internal secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan di Polrestabes Palembang. *Good Governance* yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terbukti mampu mendorong budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran.

Dengan demikian, untuk mencapai pengelolaan keuangan yang optimal, Polrestabes Palembang perlu terus memperkuat implementasi *Good Governance* dan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan. Upaya ini mencakup penguatan kompetensi sumber daya manusia, pembaruan prosedur kerja sesuai perkembangan teknologi, serta pengawasan yang lebih terintegrasi. Kedua faktor tersebut terbukti tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menciptakan sistem tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung tugas-tugas pelayanan publik kepolisian.

SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi, mengingat topik yang dibahas masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Peneliti menyarankan agar penelitian berikutnya mempertimbangkan untuk menambah variable-variabel lain, sehingga penelitian ini dapat berkembang dan menghasilkan temuan yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Lilik, dan Ika Rahmawati. 2022. "Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Bahan Baku Pada Cv Arsy Mulia Tama." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 2(2):455–65. doi: 10.32477/jrabi.v2i2.478.
- Amtiran, Paulina Y. 2020. "Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p203-214." 12(2):203–14.
- ARTAMEVIAH, RESTI. 2022. "Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1." *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* 12(2004):6–25.
- Aryani, Maura Dyan Septa. 2021. "Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul." (2013):1–23.
- Monoppo. 2018. "Pengertian Sistem Pengendalian Internal." 9–43.
- Munawaroh, Maimunatun. 2022. "Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal

Volume 4 Nomor 3 (2025) 380 – 392 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v4i3.407

- Di Kabupaten Jember." *E-Jurnal Akuntansi* 2(1):25–31.
- Nurhidayat, Ipan. 2023. "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia." *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government* 1(1):40–52.
- Pradana, Ilham Yudha et al. 2021. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pelatihan, dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan* 25(1):20. doi: 10.31315/paradigma.v25i1.8562.
- Rahman, Karlina Ghazalah, dan Sitti Hartini Rachman. 2021. "Pengaruh Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar." *Equilibrium* 2(February):25–31. doi: 10.37541/eq.v2i1.510.
- Sugiyono, Sugiyono. 2018. "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D." *Bandung: Alfabeta* 1–11.
- Susetyo, Aris et al. 2023. "Menentukan Masa Depan: Pentingnya Pengelolaan Keuangan Purnabhakti Atlit." *JCSE: Journal of Community Service and Empowerment* 4(2):165–69.
- Walangitan, Nivi et al. 2020. "Tata Kelola Dan Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 15(2):219. doi: 10.32400/gc.15.2.28199.2020.